

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani Diaz, Agnes. 2016. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT*. (hlm. 1-17). Surabaya.
- D.S. Ranuba, Erlita.dkk. 2015. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 pada DPKPA Minahasa Selatan”. *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 1:388-397.
- Jurusan Akuntansi STIE Widya Gama Lumajang. 2017, *Buku Pedoman Skripsi* . STIE Widya Gama : Lumajang.
- Juwita, Rukmi. 2014. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. POLITEKNIK POS INDONESIA. Bandung.
- Khadijah, Siti. 2017. *Analisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam pelaporan akuntansi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang*. STIE WIDYAGAMA: Lumajang.
- Kema, Ihwan, 2013. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Bitung*. UNIVERSITAS SAM RATULANGI. Manado.
- Kusuma Setiawati, Ririz. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)*. UNIVERSITAS JEMBER. Jember.

Lamonisi, Sony. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kota Tomohon”. *Jurnal EMBA*, Vol. 4, No. 1: 223-230.

Langelo, Frisca dkk. 2015. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung”. *Jurnal EMBA*, Vol.3, No.1:1-8.

Nugraheni, Purwaniati dkk. 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. UNIVERSITAS GUNADARMA.

Nurlaila. 2014. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang)*. UNIVERSITAS HASANUDDIN. Makassar.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2011. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. *Tentang Good Government*. Jakarta: Komite Pendidikan dan Pelatihan Jabatan.